

PERBANDINGAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH

**SOUND GOVERNANCE, DYNAMIC
GOVERNANCE, OPEN GOVERNMENT
DAN E-GOVERNMENT**

GOOD GOVERNANCE

Good governance merupakan salah satu konsep tata kelola pemerintahan yang dicetuskan oleh World Bank sebagai program pengelolaan sektor publik dalam rangka menciptakan keteta pemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 mengartikan bahwa good governance adalah pemerintahan yang menggambarkan akan dan menerapkan prinsi-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat di terima oleh masyarakat.

Dengan adanya konsep good governance menjadikan negara maju (negara donor) untuk memasukan sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila ingin mendapatkan bantuan dan berpartisipasi dalam menyelesaikan krisis di sebuah negara.

Di Indonesia contohnya dapat dilihat pada saat Indonesia mengalami krisis moneter yang melanda pada tahun 1997. pada akhirnya lembaga donor International Monetary Fund (IMF) menawarkan bantuan dengan syarat yang telah ditentukan. Salah satunya adalah menghambat pengembangan pesawat jet penumpang N2310 kapasitas 80-130 penumpang yang telah ditetapkan sebagai proyek nasional oleh presiden Soeharto tahun 1995.

KRITIKAN TERHADAP GOOD GOVERNANCE



Walaupun tidak bisa dibantahkan bahwa kehadiran konsep *good governance* cukup revolusioner untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara berkembang (Holzhacker, Witter, & Woltjer, 2016). Namun konsep ini mendapat kritikan bahwa konsep *good governance* merupakan konsep imperialisme dan kolonialisme dari negara maju (Farazmand, 2004)

Dari kritikan tersebut lahirlah konsep evolusi *dari good governance* yaitu ***SOUND GOVERNANCE,***
DYNAMIC GOVERNANCE, dan ***OPEN GOVERNANCE***



SOUND GOVERNANCE

Menurut Farazmand (2004) sound governance merupakan alternatif dari tata kelola pemerintahan yang baik namun harus terdiri dari beberapa komponen utama sebagai sistem yang dinamis. Unsur-unsur komponen utama tersebut seperti proses, struktural, nilai pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas dan transparansi.

Formula dasar sound governance adalah empat aktor lima komponen. Empat aktor yaitu membangun inklusifitas relasi politik antara negara, civil society, bisnis dan kekuatan internasional. Kekuatan internasional disini mencakup korporasi global, organisasi dan perjanjian internasional. Sedangkan lima komponen adalah mencakup reformasi struktur, proses, nilai, kebijakan dan manajemen.

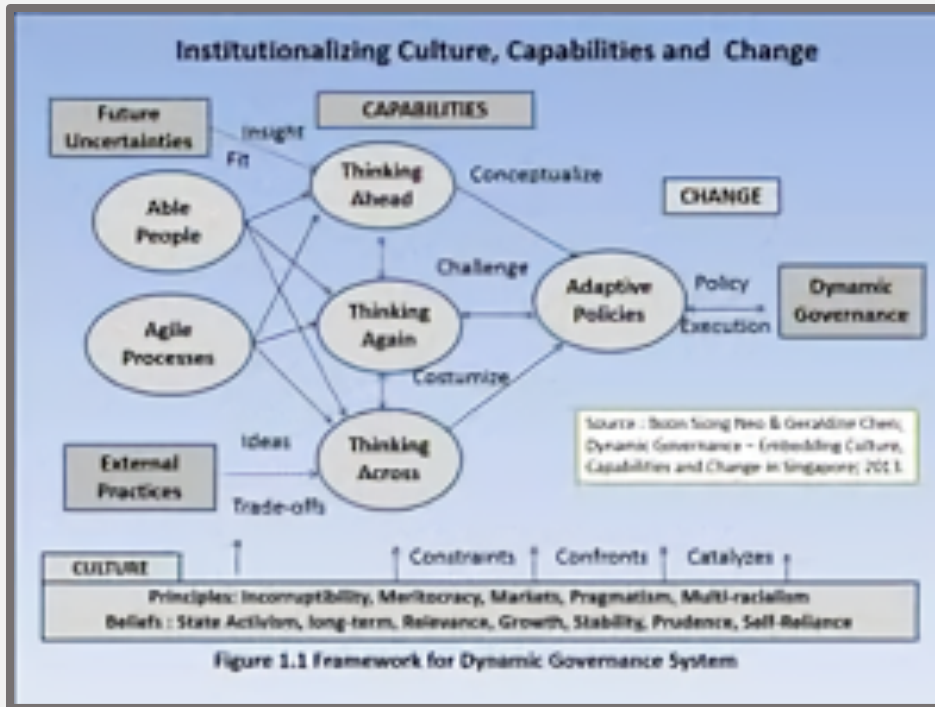


Konsep sound governance hadir akibat banyaknya kritikan dari negara berkembang yang menganggap good governance adalah sebuah konsep kapitalisme negara maju (negara donor). Namun dominasi negara maju dalam pusaran globalisasi membuat beberapa aliansi negara berkembang terbentuk seperti Uni Afrika, Perhimpunan Negara Islam, dan ASEAN.

Setiap negara khususnya negara berkembang memiliki berbagai permasalahan yang dimana dalam beberapa kasus untuk menanganinya membutuhkan kerjasama antar negara. Namun kerjasama itu tidak mengintervensi kedaulatan dan sistem negara masing-masing, juga mencakup fitur normatif, teknis dan rasional dari tata kelola pemerintahan yang baik.

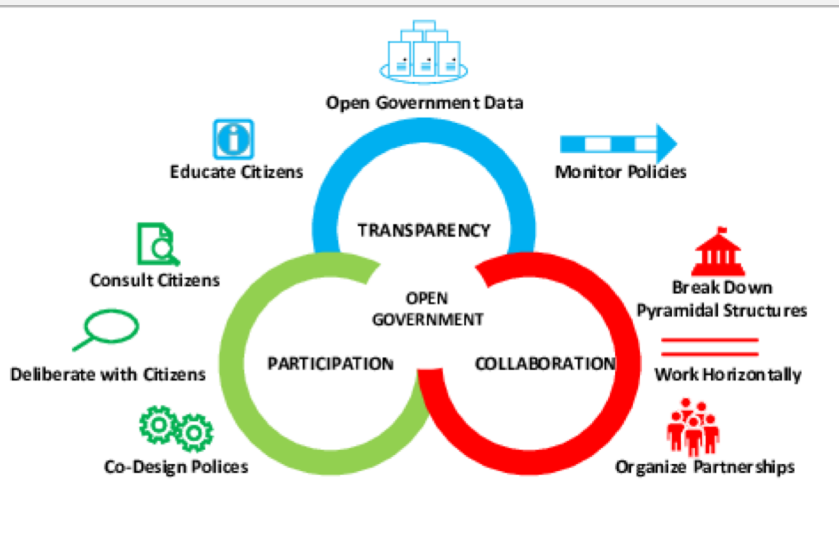
DINAMIC GOVERNANCE

Dinamic governance muncul untuk memberikan penekanan pada adaptasi tata kelola pemerintah terhadap perubahan lingkungan.



“

OPEN GOVERNMENT



Wirtz dan Birkmeyer (2015) mendefinisikan open government sebagai a multilateral, political and social process, which includes in particular transparent, collaborative and participatory action by government and administration. Sedangkan Barack obama (2009) mendefinsikan open government sebagai tindakan transparansi, partisipasi dan kolaborasi.

KONSEP

Sound governance	Dynamic governance	Open government
Dimensions	Elements	Three pillars
1. Process 2. Structure 3. Cognition and value 4. Constitution 5. Organization and instituion 6. Management and performance 7. Policy 8. Sector 9. International and globalization forces 10. Ethis, Transparency, and Accountability	1. Culture; international culture 2. Capability; Thinking ahead, thinking again, thinking accros 3. Change; adaptive policy	1. Transparency 2. Collaborative 3. participatory

PERBANDINGAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH

“

	Comparative	Focus
Sound government	Sustainability Conceptualizing	Global collaboration network, and innovation
Dynamic governance	Knowledge management theory	Tacit and explicit knowledge, and innovation
Open governance	Transparency Theory	Transparency, and innovation

”

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN



	Kekuatan	Kelemahan
Sound government	Kerjasama internasional akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah suatu negara atau organisasi	Kurang populer dalam implementasinya untuk aktivitas pemerintah dan organisasi
Dynamic governance	Dorongan untuk terus meningkatkan tacit dan explicit knowledge	Akan tidak bermakna apabila birokrasi yang korup, spoil system, nepotisme dan masyarakat belum sepenuhnya demokratis untuk mengawasi aktivitas pemerintah
Open governance	Transparansi, dan peluang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas dan pengawasan pemerintah menjadi lebih besar	Keterbukaan belum tentu akan berkontribusi signifikan terhadap transparansi



“ E-GOVERNMENT

Menurut The World Bank Group dalam Falih Suaedi, Bintoro Wardianto (2010), E-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik

“

Munculnya konsep E-government tidak lepas dari lahirnya teori-teori manajemen organisasi modern pada tahun 1980-an. Salah satu teori yang paling banyak dipelajari adalah mengenai manajemen perubahan (change management) dimana hampir semua kerangka teori tersebut ditekankan pentingnya teknologi informasi sebagai salah satu komponen utama yang harus diperhatikan.

Paradigma lain yang tak kalah penting dalam mendorong implementasi E-government adalah mengenai konsep open government. (dalam buku e-government; Konsep, Implementasi dan perkembangannya di Indonesia Etin Indrayani 2020)

E-government sebagai salah satu bentuk reformasi administrasi publik di Indonesia, terkait dengan pelaksanaan open government. Implementasi e-government yang diiringi dengan pemahaman dan penghayatan dari prinsip-prinsip open government berimplikasi terhadap perubahan pola pikir para pengguna baik pemerintah maupun masyarakat. (Andi Heny Mulawati Nurdin, 2018. *menuju pemerintahan terbuka melalui penerapan e-government*)

”